

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek kehidupan bangsa di dunia modern yang tidak dapat dipisahkan adalah hubungan internasional. Untuk maju dan berkembang, bangsa-bangsa di dunia saling membutuhkan, hal ini karena distribusi sumber daya alam dunia yang tidak merata dan sumber daya manusia yang terus berkembang. Karena itu, hubungan bilateral yang bersifat diplomatik antar negara merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentu saja, ada perbedaan mendasar antara bagaimana bangsa-bangsa berhubungan satu sama lain saat ini dan di zaman kuno. Hubungan internasional saat ini sangat menekankan nilai-nilai persahabatan dan perdamaian, berbeda dengan beberapa tahun kebelakang yang hanya lebih menekankan interaksi militan yang agresif (Setiawan, 2020).

Prinsip diplomasi adalah melaksanakan hubungan antar negara yang gagasan kerjasamanya disampaikan oleh perwakilan resmi dari setiap negara. Diplomasi merupakan metode praktis untuk memajukan kepentingan nasional di luar negaranya sendiri. Indonesia melakukan diplomasi untuk memantapkan legitimasinya sebagai negara yang berdaulat, mengangkat derajat kepentingan negara serta mengembangkan perjanjian kerjasama antar negara lain untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Diplomasi Indonesia yang landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu cara dalam menjalankan politik luar negeri. Amanat arah dan bentuk diplomasi Indonesia yang harus dilakukan oleh para diplomat yang dikerahkan secara formal oleh negara (Nugrahaningsih and Suwarso, 2021).

Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin sejak tahun 1968. Meskipun demikian, pada saat itu hubungan tersebut hanya sebatas pada tingkat konsulat jenderal yang kemudian diangkat menjadi hubungan diplomatik pada tahun 1973. Pada tahun 1974, Letnan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo merupakan orang pertama yang diberikan kewenangan untuk menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

Penuh (Duta Besar LBBP). Seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP Ambassador) merupakan pejabat eksekutif negara yang dipilih oleh Presiden untuk mewakili Republik Indonesia pada satu atau beberapa negara tertentu maupun dalam organisasi internasional untuk membahas dan melaksanakan kerja sama negara. Indonesia dan Korea Selatan mulai bekerja sama secara bilateral pada tahun 1979. Konferensi pertama membahas kebijakan bilateral pada energi negara, perdagangan LNG, minyak mentah, produk kilang, dan batubara, serta kerjasama dalam produksi minyak, gas alam, batubara, dan kekuasaan. Kesepakatan "*Joint Declaration on Strategic Partnership*" yang ditandatangani pada 4 Desember 2006 di Jakarta oleh kedua kepala negara Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun dan Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono merupakan salah satu strategi yang digunakan kedua negara untuk memperkuat hubungan kerja sama mereka, yang telah tumbuh selama beberapa dekade terakhir. Kerjasama yang tertuang dalam perjanjian *Joint Declaration on Strategic Partnership* tersebut, yaitu: kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan ekonomi, kerjasama antara politik dan keamanan serta kerjasama sosial budaya (Hidayat, Anam and Munir, 2022).

Pada masa modern ini, hubungan bilateral antar bangsa merupakan salah satu aspek hubungan internasional yang tidak dapat dipisahkan. Bagi setiap bangsa yang terlibat dalam interaksi tersebut, tentu mendapatkan peluang sekaligus tantangan. Hubungan bilateral merupakan interaksi antara dua negara yang membangun hubungan dan menjalin kerja sama bertujuan saling menguntungkan kedua belah pihak yang umumnya pada bidang bisnis perdagangan, kesehatan, ekonomi, transportasi, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hubungan kerjasama bilateral antar kedua negara diawali dengan penandatanganan persetujuan (*agreement*) yang akan dijadikan sebagai acuan dalam kerjasama yang lebih terorganisasi kedepannya (Pambudi, 2021).

Dunia dilanda bencana luar biasa di penghujung tahun 2019, yaitu krisis kesehatan yang disebabkan munculnya infeksi yang menyebar dengan cepat dan juga berakibat fatal. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-COV 2) adalah penyebab penyakit ini, yang mempengaruhi sistem pernapasan dan dikenal sebagai Penyakit *coronavirus disease 19* (COVID-19). Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan penyakit ini sebagai pandemi dunia. Adapun alasan WHO

menyatakan penyakit menular ini sebagai pandemi global, disebabkan karena skala penularan yang cepat, tingkat prevalensi yang tinggi, dan angka kematian yang terus meningkat setiap harinya, penyakit infeksi ini sudah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan Indonesia tidak luput didalamnya. Karena penyakit ini tidak dapat diprediksi dan dikendalikan, yang dampaknya antara lain terganggunya kesehatan fisik, masalah sosial, bahkan kematian. Maka menjadi ancaman bagi bangsa dan menjadi persoalan di tingkat internasional. Negara menerapkan beberapa kebijakan untuk menekan angka kejadian penyakit dan kematian dengan memberlakukan strategi *lockdown* atau sering dikenal sebagai menutup kota untuk migrasi dan membatasi penerimaan produk dan layanan, untuk memerangi masalah penyebaran wabah COVID-19. Anjuran lain yang diberikan pemerintah ialah *social distancing* dan *physical distancing* untuk memperlambat laju penyebaran virus dengan menghindari interaksi sosial secara langsung, interaksi sosial secara tidak langsung dengan menggunakan alat telekomunikasi merupakan alternatif yang dilakukan (Mentari and Chalim, 2021).

Dengan angka prevalensi yang terus naik diikuti oleh angka kematian yang signifikan maka pemerintah dunia bergerak cepat untuk mengatasi hal tersebut yang mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan untuk mencegah resiko kecacatan dan kematian serta menekan biaya tambahan tindakan kuratif pada COVID-19. Pemberian vaksinasi merupakan langkah preventif yang cukup efektif mencegah penyakit infeksi termasuk coronavirus disease 19. Negara-negara dengan situasi serupa, termasuk Indonesia, berlomba-lomba untuk mendapatkan akses vaksinasi COVID-19 yang efisien. Indonesia telah mengembangkan dan melakukan pengujian vaksin sendiri untuk mencegah ketergantungan impor dari negara lain, tetapi karena berbagai hal sampai saat ini vaksin tersebut masih belum rampung juga. Pengembangan vaksin memerlukan kerjasama dalam mengatasi krisis kesehatan yang muncul, dan ini juga merupakan salah satu interaksi dari berbagai aktor dalam hubungan internasional dimana hal ini menjadi kepentingan masing-masing negara. Interaksi aktor-aktor dalam hubungan internasional berupa kerjasama internasional yang merupakan upaya pemecahan masalah dan mencapai tujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan menumbuhkan perekonomian negara seperti sebelum pandemi terjadi. Oleh sebab itu Indonesia dan Selatan Korea membangun kolaborasi sebagai hasil dari ketergantungan mereka satu sama lain.

Terdapat 4 (empat) kerja sama bilateral yang telah dilakukan Indonesia dalam pencarian vaksin wabah ini, kerjasama dengan Korea Selatan adalah salah satunya (Hidayati and Rachman, 2021).

Dengan prevalensi yang terus meningkat dan angka kematian yang tinggi, sehingga pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk penyediaan dan pelaksanaan vaksin. Kebutuhan vaksin di seluruh dunia meningkat dengan drastis, berakibat pada keterbatasan satu produsen vaksin menyediakan vaksin dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Dalam menanggulangi hal tersebut pemerintah melakukan strategi dengan melakukan kerjasama dengan beberapa negara untuk menyediakan vaksin COVID-19 sesuai jumlah yang dibutuhkan. Negara yang menjadi produsen vaksin untuk Indonesia adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Selatan serta India. Jumlah vaksin COVID-19 yang diimpor Indonesia dari negara produsen memiliki jumlah dan jenis yang berbeda-beda, produsen terbesar untuk Indonesia adalah Tiongkok sedangkan Korea Selatan mengimpor sebanyak 1,1 juta vaksin *AstraZeneca* pada 2021 yang didistribusikan di beberapa daerah di Indonesia yaitu, Jakarta, Maluku, Bali, Sulawesi selatan, Kepulauan Riau dan Jawa Timur serta untuk seluruh TNI/POLRI di Indonesia (Setiawan, Affianty and Tanjung, 2022). Korea selatan merupakan negara dengan fasilitas kesehatan yang baik ditandai dengan jumlah kematian COVID-19 yang sedikit dibandingkan Indonesia. Berikut 5 negara yang paling berhasil dalam penanganan COVID-19 (Putri, 2022):

Tabel 1.1 Negara paling berhasil dalam penanganan COVID-19

No.	Negara	Kasus	Meninggal	Sembuh
1.	Selandia Baru	2.36 Juta	4.346	2.346.101
2.	Taiwan	10.24 Juta	19.005	10.220.993
3.	Australia	11.54 Juta	20.660	11.488.902
4.	Korea Selatan	31.61 Juta	34.736	31.243.027
5.	Jerman	38.43 Juta	174.170	38.232.400

Sumber : (Putri, 2022)

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51602077>

Dari tabel prevalensi, mortalitas, dan jumlah kesembuhan dari beberapa negara dan salah satunya Korea Selatan. Dengan presentasi kesembuhan sebesar 98% Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mampu menekan kejadian COVID-19 dengan baik dibuktikan dengan kota yang tadinya lockdown dibuka kembali setelah melakukan langkah cepat dengan pengembangan vaksin *AstraZeneca*. Hal tersebut membuat Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Korea selatan untuk mendatangkan vaksin ke Indonesia untuk mencegah prevalensi yang semakin meningkat.

Teori konstruktivisme diterapkan dalam penelitian ini untuk menjelaskan isu-isu yang diangkat dan dibahas oleh peneliti. Teori ini diperkenalkan oleh seorang akademisi Amerika Serikat yang merupakan salah satu tokoh konstruktivis dalam hubungan internasional yaitu Nicholas Onuf. Sudut pandang konstruktivis berpendapat bahwa sejarah dan masyarakat, merupakan pengaruh yang melekat pada sifat manusia atau faktor lain dari politik global, yang membentuk aspek signifikan dari interaksi internasional. Berlawanan dengan anggapan neorealisme dan neoliberalisme, konstruktivisme bertujuan untuk menunjukkan bahwa elemen dasar hubungan internasional diproduksi secara sosial (Dugis *et al.*, 2018).

Teori konstruktivisme mengakui bahwa suatu fenomena melibatkan baik individu maupun orang lain selain dirinya sendiri. Ada hubungan yang terjalin antar pribadi, tidak hanya antar individu (*Self-centric*). Untuk membantu mengidentifikasi apakah kehadiran aktor lain berdiri sebagai teman atau musuh, ada strategi, proses pembelajaran, dan akhirnya prosedur identifikasi. Aspek lain, serta lingkungan dan lingkungan sosial mereka, berdampak pada semua ini. Kerangka global konstruktivisme menempatkan penekanan kuat pada agen-agennya, yang dapat dianggap sebagai subjek atau aktor global. Sistem global berfungsi sebagai platform untuk pertukaran nilai antar aktor (nilai saham). Nilai dan wilayah yang hadir dalam sistem internasional tidak tercipta secara alami; sebaliknya, mereka diciptakan (Fitria and Khoirul, 2021).

Organisasi kesehatan dunia (WHO) masih belum mencabut status pandemi COVID-19, walaupun sepertinya COVID-19 telah berlalu tetapi pencegahan harus tetap dilakukan kejadian penyakit yang lebih parah kedepannya. Negara Indonesia tidak mampu melewati krisis ekonomi dan kesehatan yang terjadi tanpa kerjasama dari negara

lain, dalam hal ini kerjasama diplomatik dapat memperkuat negara dalam pemenuhan sumber daya dan peningkatan ekonomi. Selain itu, untuk Indonesia, kerjasama dalam hal ini dilakukan tidak hanya untuk membuat vaksin tetapi juga untuk mencari dukungan berupa bantuan medis untuk memerangi virus COVID-19. Setiap negara memperoleh manfaat dari kerja sama bilateral yang dilakukan, yang terkait dengan diplomasi kesehatan. Berdasarkan beberapa fakta yang telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan untuk mengangkat masalah kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dengan Judul **“Upaya Diplomasi Kesehatan Indonesia Melalui Kerjasama Bilateral Dengan Korea Selatan Dari Perspektif Konstruktivisme”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang kesehatan?
2. Bagaimana upaya diplomasi kesehatan Indonesia pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo?

1.3 Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan masalah pada dua poin rumusan masalah di atas guna mempersempit penekanan penelitian ini, guna menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan unggul. Pertama, hal-hal yang sehubungan dengan latar belakang kerjasama bilateral di bidang kesehatan di masa pandemi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kedua, diplomasi kesehatan yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan dalam penyediaan vaksin COVID-19.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang kesehatan di tengah pandemi COVID-19 serta menganalisis bagaimana diplomasi antara Indonesia dan Korea Selatan di era pemerintahan presiden Joko Widodo.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat manfaat yang didapatkan oleh penulis, antara lain :

1. Mengetahui kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan.
2. Mengetahui kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang kesehatan dalam menanggulangi pandemi COVID-19.
3. Mengetahui bahwa diplomasi vaksin COVID-19, memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan.
4. Mengetahui diplomasi kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan di era pemerintahan presiden Joko Widodo.

1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

Para penulis menggunakan sejumlah ide dan konsep yang relevan dan sah untuk topik normalisasi hubungan antara negara-negara Indonesia dan Korea Selatan untuk mendukung dan mengklarifikasi analisis yang akan ditawarkan dalam penelitian ini. Berikut teori dan konsep yang diterapkan dalam penelitian ini:

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai sumber informasi sambil memeriksa masalah dan menghasilkan solusi. Selain itu, literatur ini akan menyoroti perbedaan antara temuan dari penelitian sebelumnya dan yang coba dijelaskan oleh penelitian ini. **Diplomasi kesehatan Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan vaksin COVID-19 (Putri, 2022)** merupakan judul *literature review* pertama yang dijadikan sebagai narasumber. Esai ini mengkaji diplomasi COVID-19 Indonesia dan Korea Selatan dalam kaitannya dengan kemajuan vaksin. *Coronavirus disease-19* merupakan ancaman serius bagi manusia dan bangsa. Di Korea Selatan dan Indonesia, banyak lapisan masyarakat yang merasakan dampak COVID-19. Otoritas Korea Selatan dengan cepat menerapkan tindakan pencegahan di kota-kota yang terkena dampak sebagai akibat dari pertumbuhan terus menerus virus corona di Korea Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya kasus COVID-19 di Korea Selatan, dibukanya wilayah yang sebelumnya dikarantina, dan kembali beroperasi normalnya ruang publik.

Kedisiplinan masyarakat Korea Selatan yang begitu efektif dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19 turut menjelaskan mengapa Korea Selatan menjadi salah satu negara yang cepat tanggap menghadapi COVID-19. Pemerintah Korea Selatan kemudian membantu negara-negara lain yang terkena dampak COVID-19, terutama melalui inisiatif kerja sama dengan Indonesia. Tulisan yang akan ditelaah, tulisan dalam *literature review* kali ini peneliti menjabarkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan melalui upaya diplomasi di bidang kesehatan, dengan fokus pada diplomasi vaksin dan strategi penanganan pandemi kedua negara.

Masalah diplomasi kesehatan Indonesia di masa pandemi (Wicaksana, 2020) menjadi topik kajian literatur kedua. Menurut teori, implementasi diplomasi yang mengutamakan keamanan kesehatan mencakup empat elemen penting: normatif, bisnis, keamanan, dan strategis. Setiap komponen terkait erat satu sama lain dan harus bekerja sama sebagai satu kesatuan. Sektor kesehatan, ilmuwan, bahkan intelijen harus bekerja sama dengan para pelaku kebijakan luar negeri sebagai organisasi pendukung aspek diplomasi. Jika melihat sejarah diplomasi Indonesia, setidaknya sejak Reformasi, terlihat bahwa aktivisme internasional terkait kesehatan global belum mendapat prioritas utama atau anggaran yang cukup besar. Kegagalan diplomasi menyebabkan ketidakmampuan bangsa untuk mengatasi gejala dan dampak pandemi, yang pada gilirannya menjadi ancaman serius bagi kepentingan material dan nonmaterial negara.

Penanganan pandemi COVID-19 konteks Indonesia pada tahap awal terlihat belum serius, sehingga belum ada sistem antisipasi yang memadai ketika wabah menyebar, menurut kajian literatur ketiga yang dijadikan acuan dalam buku ini, **Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia (Mas'udi and Winanti, 2020)** Dan buku ini menggambarkan bagaimana kurangnya informasi yang tepat tentang COVID-19. Dampak ekonomi-sosial dunia yang signifikan juga dijelaskan dalam penelitian ini. Jadi, tujuan khusus dari buku ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan analisis awal tentang berbagai aspek pemerintahan di berbagai negara. Pengumpulan informasi ini akan berkontribusi pada debat publik yang lebih terinformasi tentang penanganan COVID-19 saat ini dan dampak yang ditimbulkannya.

1.5.2 Landasan Teori

Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian diperlukan untuk makalah ini, termasuk:

1.5.2.1. Teori konstruktivisme

Teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional membahas konsep dan norma sosial seperti hak asasi manusia dan kepedulian lingkungan (Suparlan, 2019). Dengan dunia menjadi lebih saling berhubungan dan demokratis, teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perubahan keadaan sosial budaya dalam dunia politik dan hubungannya dengan diplomasi yang dilakukan oleh beberapa negara. Teori konstruktivis digunakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya, seperti kekerasan, masalah gender, konflik rasial (Suparlan, 2019). Konstruktivisme tidak hanya menjelaskan suatu hal, tetapi juga memahami masalah yang terjadi. Teori ini berawal dari teori sosial yang menjelaskan bagaimana ilmu sosial dapat membantu mahasiswa hubungan internasional dalam memahami pentingnya norma dan identitas dalam politik global. Teori konstruktivisme juga mengeksplorasi bagaimana ide, minat, dan norma terkait (Utami, 2016). Fokus dalam teori ini adalah bagaimana pemahaman konstitusional berhubungan dengan politik internasional, khususnya bagaimana negara berkembang dan berkontraksi, serta bagaimana membahas hukum dan standar (Supardan, 2016). Menggunakan ide sebagai elemen struktural, menekankan hubungan dinamis antara ide dan kekuatan material sebagai hasil dari bagaimana aktor memanipulasi materi dunia nyata, dan menekankan hubungan antara bagaimana agen menciptakan struktur dan bagaimana struktur menciptakan agen merupakan contoh konstruktivisme. Karenanya, konstruktivisme adalah teori sosial yang berfokus pada hubungan konseptual antara agen dan struktur (Muhaimin, Hidayat and Mulyani, 2021).

Adapun pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Berikut pengertian dan pendapat tentang teori konstruktivisme menurut para ahli terkemuka (Supardan, 2016) :

Tabel 1.2 Pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli

No.	Ahli	Pengertian
-----	------	------------

1.	Alexander Wendt, 1992	Realitas dalam hubungan internasional tidak ditentukan oleh struktur objektif atau kepentingan material, tetapi lebih merupakan hasil dari interpretasi sosial bersama dan pemahaman bersama. Ia berpendapat bahwa negara-negara dan aktor-aktor dalam sistem internasional menciptakan dan menjalankan hubungan berdasarkan norma-norma, identitas, dan konstruksi sosial yang mereka terima.
2.	Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, 1998	Norma-norma sosial memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan dan kebijakan negara-negara. Ia menyoroti bagaimana norma-norma, seperti norma kemanusiaan atau norma nonproliferasi nuklir, dapat membentuk kebijakan dan perilaku negara-negara dalam sistem internasional.
3.	Friedrich Kratochwil, 1989	Negara-negara dan aktor-aktor dalam sistem internasional tidak hanya diatur oleh struktur dan kepentingan material, tetapi juga oleh norma-norma sosial dan interpretasi yang mereka berikan terhadap realitas tersebut.

Sumber : (Supardan, 2016)

<https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/book/tool/print/index.php?id=25297>

Konstruktivisme mengacu pada "fakta sosial" seperti kedaulatan, hak, atau uang yang tidak didasarkan pada realitas fisik tetapi diberi signifikansi dan realisme oleh komunitas yang bertindak sesuai dengannya. Gagasan tentang "fakta sosial" terkait erat dengan konstruksi realitas ini, atau yang sering kita sebut sebagai "realitas objektif" (John Searle, 2003). Kehadiran ini mempengaruhi cara kita mengklasifikasikannya dan cara kita menanganinya. Konstruktivisme sosial terus-menerus dihadapkan pada pertanyaan kapan norma berubah, apa yang menyebabkan perubahan norma, bagaimana aktor menerima perubahan norma ini, dan apakah aktor membujuk atau memaksa orang lain untuk menerima standar baru atau tidak. Teori ini membuat berbagai poin mengenai pertumbuhan kedaulatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap hukum dan standar di dalam suatu negara. Untuk menggeneralisasi klaim substantif, penting untuk mengidentifikasi aktor utama, motivasi dan kemampuan mereka, dan fitur penting dari kerangka normatif. Misalnya, untuk memahami organisasi pemberontak, kita harus memahami pandangan dunia mereka, kekuatan pendorong mereka, dan elemen normatif dari struktur sosial mereka. Hal yang sama berlaku untuk membuat konvensi, konsep, dan hubungan yang didasarkan pada tujuan dan identitas peserta perang, apakah ingin mencapai perdamaian atau penghormatan terhadap hak asasi manusia (Rachmawati, 2016).

Meskipun mereka dapat diperkenalkan oleh pelakunya sendiri ke dalam kegiatan-kegiatan yang dikembangkan berdasarkan budaya, tidak berarti bahwa mereka selalu

pasti, terutama jika menyangkut masalah politik. Cara aktor memahami dan menciptakan realitas sosial mereka dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Persepsi orang tentang dunia dibentuk oleh pengetahuan seperti kategori, aturan, konsep, dan simbol. Pengetahuan yang membangkitkan manusia untuk mengkonstruksi dan memberi makna pada suatu realitas diproduksi oleh sejarah, dalam kaitannya dengan kebudayaan. Realitas tidak ada di luar sana menunggu untuk ditemukan atau diakui. Intinya, ini berarti bahwa kategori yang sudah ada memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tujuan dunia dan tindakannya. Kekuasaan (*Power*) dapat dihasilkan dari identitas, kepentingan, dan makna dalam batas-batas otoritas yang dimiliki para pelaku tersebut dalam mengarahkan kehidupannya. Kekuasaan (*Power*) bukan hanya kemampuan satu aktor untuk memberitahu aktor lain apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Konstruktivis memberikan elemen penting untuk mengenali kekuatan atau kekuatan. Dalam hal kekuasaan, semakin besar pengaruh yang dimiliki seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk membujuk orang lain untuk berbagi kepentingannya, seperti bekerja sama untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu kebijakan. Identitas dan kepentingan aktor seperti negara juga dibentuk oleh struktur normatif (Dugis *et al.*, 2018).

Norma sosial adalah peraturan, dan ada hukum yang memungkinkan dan menafsirkan kegiatan tersebut baik secara hukum maupun menurut kegiatan. Ini menyiratkan bahwa norma sosial dapat berkembang menjadi standar hukum yang mengkategorikan dan menentukan perilaku manusia. Ini disebut sebagai konstruksi sosial dari suatu realitas yang dapat menimbulkan suatu tindakan yang dibenarkan. Kondisi sosial masyarakat, dimana hubungan-hubungan yang terbentuk di sana menimbulkan komitmen terhadap nilai, gagasan, dan norma dalam kehidupannya, berdampak pada keberadaan suatu norma dan gagasan. Identitas dan kepentingan suatu bangsa kemudian dimunculkan oleh hal ini. Perusahaan juga dapat menetapkan nilai dan norma di lingkungannya dan, tergantung pada tujuannya, mereka mungkin dapat memengaruhi atau menciptakan nilai dan norma baru di negara lain. Nilai dan konvensi dapat berubah tergantung pada situasi masyarakat saat ini. Konstruktivisme kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan bagaimana identitas membentuk kepentingan negara dan berkembang menjadi keputusan logis untuk memahami beragam budaya. Konsep hak asasi manusia mencakup standar dan cita-cita yang diperjuangkan pada akhir perang dingin. Hak untuk

hidup, hak atas keamanan dan martabat, hak untuk memilih pekerjaan yang sesuai, dan hak-hak lainnya merupakan konstruksi nilai dan standar tentang hak asasi manusia yang telah diterima oleh masyarakat dunia (Muhaimin, Hidayat and Mulyani, 2021).

1.5.2.1. Teori Liberalisme

Liberalisme adalah salah satu pandangan, paham, atau ideologi dalam filsafat ilmu politik dan moral. Liberalisme adalah paham akan kebebasan. Individu diberi kebebasan untuk berkembang tanpa terbatas dalam pemikiran, agama, pers dan politik tapi kebebasan bagi kaum liberal juga harus tetap dipertanggung jawabkan. Pandangan ini mulai berkembang pada abad 18 -19 di Prancis dan Inggris dengan penekanan pada kebebasan. Individu untuk mewujudkan kesejahteraan melalui perubahan dan inovasi organisasi sosial. Teori liberalisme juga menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu disemua bidang, baik itu didalam bidang politik, ekonomi, ataupun agama. Secara umum, liberalisme tersebut mencita-citakan masyarakat yang bebas yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berfikir bagi tiap-tiap atau masing-masing individu. Didalam masyarakat modern, liberalisme tersebut akan tumbuh didalam sistem demokrasi, hal tersebut disebabkan oleh karena keduanya sama-sama dilandaskan pada kebebasan mayoritas (Alwino, 2017).

John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitasaktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti privat. Karenanya, pemerintah bersifat terbatas (minimal) terhadap kehidupan warganya. Untuk itu harus ada aturan hukum yang jelas dan lengkap dalam menjamin kebebasan sebagai hak properti privat ini. Di sisi lain Rousseau berpendapat bahwa pemerintah harus tetap berfungsi menjamin terlaksananya kebebasan individu dalam masyarakat. Corak liberalisme ini selanjutnya mendasari dan menginspirasi munculnya liberalisme egalitarian, dengan tokohnya antara lain John Rawls dan Ronald Dworkin. Liberalisme ini berusaha menyatukan ide kebebasan dan kesamaan individu dalam masyarakat. Pemerintah dibutuhkan untuk meredistribusikan nilai-nilai sosial dalam melaksanakan dan mencapai kebebasan dan kesamaan individu-individu dalam masyarakat (Ulfa, 2021).

1.5.3 Kerangka Konseptual

1.5.3.1 Konsep Kerjasama Bilateral

Kerja sama antara dua negara yang bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama disebut sebagai kerja sama bilateral (Shira, 2021). Bilateral berfokus pada pertukaran politik dan budaya antara dua negara misalnya, penandatanganan perjanjian, pertukaran duta besar, atau kunjungan kenegaraan. Kerja sama politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi antara dua negara disebut sebagai kerja sama bilateral. Kerjasama bilateral adalah norma dalam kerja sama internasional. Interaksi bilateral dapat digantikan dengan kerjasama multilateral antara banyak negara serta unilateral atau tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu negara (*freewill*). Kerja sama dimungkinkan dalam berbagai konteks. Sebagian besar pertukaran kerja sama terjadi ketika dua negara secara bersamaan menangani masalah atau kepentingan yang mirip satu sama lain. Organisasi dan perjanjian internasional berfungsi sebagai representasi fisik dari bentuk kolaborasi lain yang dipraktikkan oleh masing-masing negara. Kerjasama internasional mencakup berbagai bidang, termasuk ideologi, politik, norma-norma sosial dan budaya, lingkungan, dan militer dan keamanan (Yunanda, 2020).

Kerjasama bilateral didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dua negara merdeka untuk bekerja sama memecahkan suatu masalah yang mempengaruhi keduanya melalui diskusi, kesepakatan, dan cara lain (Shira, 2021). Hubungan antara dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang terwujud dalam bentuk kerjasama. Berdasarkan sejauh mana manfaat timbal balik yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi kepentingan tindakan unilateral dan bilateral. Contohnya kepentingan beberapa negara pada organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengamanatkan agar kerjasama yang dilakukan antar anggota organisasi dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, kerjasama bilateral tidak mungkin terjadi jika suatu negara dapat mencapai tujuannya sendiri. Mengingat bahwa setiap negara bergantung satu sama lain

untuk memajukan kepentingan internalnya sendiri, diyakini bahwa kerjasama akan berhasil (Susilowati *et al.*, 2023).

Berikut adalah beberapa dari berbagai variabel yang menjadi fokus perhatian dalam kerjasama bilateral:

1. Negara bukan lagi aktor tunggal dalam politik internasional; sebaliknya, itu adalah komponen dari jaringan interaksi yang melibatkan militer, ekonomi, budaya, aktor politik, dan masyarakat sipil.
2. Karena organisasi internasional seringkali tidak hanya kompeten menangani berbagai kepentingan negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan memiliki kekuatan untuk menegakkan kepentingannya sendiri, maka kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara peserta.

1.5.3.2. *Soft Diplomacy*

Salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu negara adalah koneksi diplomatiknya. Kontak diplomasi suatu negara dengan negara lain akan memudahkan dan memberi mereka lebih banyak kemungkinan untuk mengejar kepentingan dan kebutuhan nasional mereka. Karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negara sendirinya, hubungan diplomatik merupakan aspek lain dari kehidupan internasional yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah hubungan diplomatik berawal dari kerajaan kuno, namun hubungan diplomatik era modern berbeda karena mereka mengambil bentuk yang lebih canggih dan mengirimkan lebih banyak perwakilan kedutaan. Diplomasi merupakan salah satu hubungan internasional antar negara yang diperhitungkan dan memiliki dampak baik untuk setiap negara. Diplomasi dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu negara dengan negara lain dalam definisi sederhananya. Dalam KBBI disebutkan diplomasi merupakan penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dengan yang lain. G.R. Berridge (2010) mendefinisikan diplomasi sebagai tindakan politik yang diambil oleh para aktor untuk mencapai tujuan mereka dan mempertahankan kepentingan mereka melalui negosiasi tanpa menggunakan kekuatan, *disinformation*, atau sistem hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, hubungan diplomasi antar bangsa merupakan penyelenggaraan hubungan internasional antar negara yang meliputi

perundingan yang dapat mempererat perdamaian dunia yang dilakukan oleh perwakilan negara yang saat ini dikenal sebagai duta besar atau diplomat (Nabilla, 2021).

Selain perwakilan resmi yang telah ditetapkan negara. Organisasi swasta seperti Organisasi Non-Pemerintah (LSM), Organisasi Antar Pemerintah (IGO), individu, Perusahaan Multinasional, dan Korporasi juga dapat peran penting dalam hubungan internasional. Ada empat komponen diplomasi yang saling terhubung satu dengan yang lain. Antara lain diskusi/komunikasi, pengakuan, kepentingan nasional dan negosiasi internasional. Komponen pertama adalah diskusi atau komunikasi yang tujuan dasar diplomasi adalah untuk menjalin komunikasi dengan negara lain dan disusul oleh aspek lain yang saling berkaitan. Diplomasi pada awalnya dipraktikkan untuk menjaga hubungan persahabatan dengan negara lain dan untuk mencegah perselisihan internasional. Luasnya cakupan kepentingan suatu negara merupakan salah satu faktor pendorong strategi diplomasi negara tersebut. Setiap bangsa memiliki seperangkat kepentingan nasionalnya sendiri yang menjadi faktor pendorong utama suatu bangsa membutuhkan kerjasama internasional untuk memajukan kepentingan nasionalnya (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, 2021).

Diplomasi semakin penting sebagai alat dalam hubungan internasional di era globalisasi yang semakin kompleks. *Hard diplomacy* telah menjadi praktek umum, di mana negara-negara menggunakan kekuatan militer, ekonomi, dan politik untuk mencapai tujuan nasional mereka. Namun, ada pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam lingkungan diplomatik, yaitu "*soft diplomacy*" atau diplomasi lunak. *Soft diplomacy* didefinisikan sebagai cara suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui pendekatan sosial dan budaya (Yani and Lusiana, 2018). Dalam penelitian penulis, konsep yang relevan dengan studi kasus yang diangkat adalah *soft diplomacy*.

Soft diplomacy mengacu pada penggunaan strategi non-koersif dan persuasif untuk mempengaruhi pihak lain. Pendekatan ini melibatkan penggunaan kekuatan lunak, seperti budaya, nilai-nilai, pendidikan, dan diplomasi publik, untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara negara-negara dan masyarakat mereka. Tujuan utama *soft diplomacy* adalah mencapai kerjasama, pemahaman, dan saling pengertian melalui

dialog yang konstruktif (Pujayanti, 2017). Dalam *soft diplomacy*, negara-negara berusaha membangun hubungan yang positif melalui pertukaran budaya, seni, musik, olahraga, pendidikan, dan turisme. Strategi ini melibatkan memperkenalkan aspek-aspek positif dari suatu negara kepada masyarakat internasional untuk mempengaruhi persepsi mereka. *Soft diplomacy* bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai yang dianggap positif dan menciptakan citra yang baik bagi negara yang melaksanakannya (Jayanti, Suwartiningsih and Ismoyo, 2019). *Soft diplomacy* Indonesia dalam bidang kesehatan telah menjadi bagian integral dari upaya diplomasi negara untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terlebih di saat pandemi. Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam menjalankan *soft diplomacy* di berbagai negara salah satu nya Korea Selatan, baik secara bilateral maupun melalui kerja sama multilateral untuk mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 yang terjadi (Setiawan, Affianty and Tanjung, 2022) .

1.5.4 Hipotesis

Setelah masuknya COVID-19, kerja sama bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia memburuk, dan COVID-19 juga menyebar lebih luas. Alhasil, Indonesia dan Korea Selatan melakukan diplomasi vaksin sebagai cara untuk memperdalam hubungan bilateral. Namun jika dilihat dari sisi kemanusiaan, diplomasi vaksin ini merupakan hubungan kerjasama antar negara untuk bertahan dalam situasi darurat pandemi COVID-19 saat ini. Ini juga mencerminkan pendekatan Indonesia untuk memerangi COVID-19, begitu banyak upaya yang dilakukan Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran virus seperti melakukan *lockdown*, pembatasan interaksi sosial (*social distancing* dan *physical dictancing*). Begitu pula dengan Korea Selatan melakukan upaya penanganan COVID-19 dengan berbagai strategi tetapi masih kurang efektif mencegah akan kejadian penyakit. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, dilakukannya diskusi dan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan bersama.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami sepenuhnya fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, fenomena tersebut digambarkan dalam kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu, dengan menggunakan metode alamiah (Abdussamad, 2021).

Fokus penelitian kualitatif lebih pada kualitas daripada kuantitas, dan informasi yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian bisa berasal dari wawancara, observasi langsung, dan dokumen pemerintah, serta survei dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif, metode lebih penting daripada temuan akhir. Hal ini karena jika proses diamati, hubungan antar komponen yang diselidiki akan menjadi lebih jelas. Sementara itu, penelitian deskriptif tidak membandingkan atau mengeksplorasi hubungan antar variabel; melainkan bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang keberadaan variabel bebas, baik pada satu variabel maupun beberapa (variabel yang berdiri sendiri) (Abdussamad, 2021).

1.6.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian ini, dimana data penelitian yang dikumpulkan akan digunakan untuk menguji teori atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan. Penelitian yang dilakukan menggunakan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Studi dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data, seperti buku-buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, dan data penting lainnya yang relevan dan mendukung penelitian. Data yang dikumpulkan dan dibahas dalam penelitian ini merupakan data sekunder berasal dari buku, jurnal, situs web, dan berita yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.3 Metode Analisis

Proses metode analisis merupakan suatu proses penempatan dan penyusunan data secara metodis dari catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengkategorikan data, mendeskripsikannya dalam unit-unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih data mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kemudian memberi kesimpulan yang sederhana untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Metode analisis yang dilakukan peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman, Model analisis ini terdiri dari 4 proses utama yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Kajian ini dibagi menjadi 5 bab, dan setiap bab pembahasannya akan menjelaskan dan menguraikan permasalahan secara rinci. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan

Penulisan dalam bab ini peneliti akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II Indonesia dan Korea Selatan Pada Masa Pandemi

Pada bab II ini peneliti akan menggambarkan mengenai latar munculnya pandemi yang melanda dua negara tersebut COVID-19, dan membahas mengenai keadaan Indonesia dengan Korea Selatan saat pandemi terjadi.

Bab III Latar Belakang Kerjasama Bilateral Antara Indonesia dan Korea Selatan Di Bidang Kesehatan

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan mengenai latar belakang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang kesehatan serta hubungannya dalam penanggulangan COVID-19.

Bab IV Upaya Diplomasi Kesehatan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Pada bab IV peneliti akan memaparkan apa yang menjadi upaya diplomasi kesehatan Indonesia pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo serta menjelaskan cara yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan dalam mengatasi dampak tersebut yang dilihat dari perspektif Konstruktivisme.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Pada bab terakhir ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan serta memberikan saran.